

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Setiap negara pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi kebutuhan di negaranya. Untuk memenuhi semua kebutuhannya suatu negara perlu bekerjasama dengan negara lain. Suatu negara di dunia walaupun sudah modern, wilayahnya luas dan sumber daya alamnya melimpah, tidak akan pernah mampu hidup mandiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Dewasa ini dengan semakin modern kebudayaan umat manusia di suatu negara justru semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap negara lain.<sup>1</sup>

Hubungan ekonomi tersebut dapat berupa hubungan dagang maupun kerjasama ekonomi lainnya. Hubungan ekonomi antar bangsa semakin meluas ke segala penjuru dunia dan ini disebut globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai proses menyatunya kegiatan ekonomi antar negara yang terjadi di dunia. Globalisasi ekonomi terjadi pada era perdagangan bebas, yaitu suatu perdagangan yang dilakukan antara suatu negara dengan negara yang lain tanpa adanya hambatan. Hambatan yang berupa bea masuk, bea impor, kuota, larangan impor dan subsidi terhadap industri dalam negeri dihilangkan. Globalisasi ekonomi terjadi karena adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, teknologi informasi dan transportasi. Adanya globalisasi ekonomi tersebut, batas-batas negara menjadi kurang berarti jika dilihat dari segi ekonomi.

---

<sup>1</sup> Untuk lebih detail silahkan lihat di <http://listitania.blogspot.com/2011/12/latar-belakang-kerja-sama-antarnegara.html>. Diakses pada tanggal 11 November 2014.

Kegiatan-kegiatan perekonomian tidak mengenal lagi batas-batas kenegaraan, bukan lagi sekedar internasional bahkan transnasional. Adanya globalisasi ekonomi, kegiatan perekonomian antar negara dengan cepat merambah ke negara-negara lain. Para investor dengan bebas dapat menentukan negara tempat tujuan investasinya. Para produsen juga dengan mudah menentukan negara yang dijadikan pasar sasarannya. Bahkan, negara-negara yang sedang berkembang dapat dengan mudah mendapatkan negara yang bersedia menjadi pendonor dana bagi pembangunannya.

Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Kerjasama tersebut dapat terjadi hanya melibatkan dua negara maupun lebih.<sup>2</sup>

Kerjasama ekonomi internasional dapat berjalan dengan harmonis apabila tiap negara yang terlibat dapat menikmati keuntungannya. Selain itu, kerjasama tersebut juga harus didasari rasa ingin membantu negara lain. Mereka yang terlibat dalam kerjasama ekonomi internasional harus memahami tujuan diadakannya kerjasama tersebut. Berdasarkan pengertian kerjasama, maka setiap negara yang mengadakan kerjasama dengan negara lain pasti mempunyai tujuan, seperti :

- a. Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama;
- b. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang;
- c. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia;

---

<sup>2</sup> Untuk lebih jelas silahkan akses di [http://adityaedgardia.blogspot.com/2013/02/kerjasama-ekonomi-internationalbab-16\\_1742.html](http://adityaedgardia.blogspot.com/2013/02/kerjasama-ekonomi-internationalbab-16_1742.html). Diakses pada tanggal 11 November 2014.

- d. Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan; dan
- e. Meningkatkan devisa negara.<sup>3</sup>

Seperti diketahui, bahwa sebuah kerjasama tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama yang didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki antar negara. Perbedaan-perbedaan yang kemudian mendorong suatu negara melakukan kerjasama, misalnya pada perbedaan sumber daya alam, perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya perbedaan ideologi. Sedangkan persamaannya, yaitu dalam sumber daya alam, kesamaan keadaan wilayah (kondisi geografis), kesamaan ideologi dan kesamaan agama.<sup>4</sup>

Hubungan kerjasama antar negara di bidang ekonomi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk kerjasamanya ditentukan berdasarkan negara yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan jumlah negara yang mengadakan kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral.<sup>5</sup>

Di Indonesia energi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Pembangunan prasarana dan industri yang sedang giat-giatnya dilakukan di Indonesia membuat pertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan yang sangat tinggi melebihi rata-rata kebutuhan energi global mengharuskan Indonesia untuk segera

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Untuk lebih jelas silahkan lihat di

[http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Kerjasama\\_Ekonomi\\_Internasional\\_9.2\\_%28BAB\\_16%29](http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Kerjasama_Ekonomi_Internasional_9.2_%28BAB_16%29).  
Diakses pada tanggal 11 November 2014.

menemukan cadangan migas baru, baik di Indonesia maupun dengan melakukan ekspansi ke luar negeri. Cadangan minyak bumi dalam kondisi *declining*, sebaliknya gas bumi cenderung meningkat. Perkembangan produksi minyak Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sehingga perlu upaya besar untuk menemukan cadangan-cadangan baru dan peningkatan produksi.<sup>6</sup>

Ketergantungan Indonesia pada energi fosil membuat produksi minyak bumi dalam negeri menurun drastis sejak tahun 2001 silam. Keadaan ini didorong oleh kebutuhan yang terus naik dan tumbuhnya sektor industri di Indonesia. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, mengatakan ketergantungan energi fosil masih didominasi oleh kebutuhan minyak yang mencapai 41,8%, disusul batu bara 29% dan gas 23%. Kebutuhan ini untuk memenuhi sektor industri yang mendominasi sebesar 37% penggunaan energi fosil di Indonesia. Kebutuhan yang sangat besar ini ternyata tidak bisa ditopang oleh cadangan energi di Indonesia yang kian menipis. Cadangan minyak misalnya, hanya cukup untuk 23 tahun lagi. Sementara cadangan gas masih cukup sampai 50 tahun ke depan dan batu bara cukup untuk 80 tahun mendatang.<sup>7</sup>

Kegiatan eksplorasi masih terus diupayakan oleh pemerintah lewat perusahaan-perusahaan minyak yang beredar di bumi pertiwi. Akan tetapi, melihat tren menurunnya cadangan minyak bumi di Indonesia dalam dua dekade terakhir rasanya sulit untuk berharap adanya penemuan cadangan-cadangan minyak baru dalam jumlah besar. Indonesia memang diprediksi memiliki cadangan minyak bumi potensial yang diperkirakan sebesar 50 miliar barel, tetapi

---

<sup>6</sup> <http://www.lmfeui.com/data/Analisis%20Industri%20Minyak.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2014.

<sup>7</sup> Untuk lebih jelas lihat di <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/09/14/cadangan-minyak-di-indonesia-hanya-cukup-untuk-23-tahun-lagi>. Diakses pada tanggal 29 November 2014.

tidak ada jaminan bahwa statusnya bisa ditingkatkan menjadi cadangan minyak bumi. Tingginya biaya investasi dan rumitnya birokrasi yang ada di Indonesia membuat perusahaan-perusahaan minyak enggan untuk aktif melakukan kegiatan eksplorasi.<sup>8</sup>

Masih berdasarkan sumber diatas, saat ini perusahaan – perusahaan minyak sebagian besar mengandalkan lapangan – lapangan minyak tua yang produksinya terus menurun setiap tahunnya. Hanya blok Cepu yang merupakan kategori lapangan minyak baru yang sangat diharapkan sebagai salah satu tumpuan produksi minyak mentah nasional. Sejauh ini juga belum terdengar penemuan lapangan minyak baru lagi dalam jumlah besar. Oleh karenanya, seperti kita lihat akhir-akhir ini Pertamina sebagai perusahaan migas nasional mulai gencar melakukan ekspansi ke luar negeri dengan menjalin kerjasama, baik secara *G to G (Government to Government)* maupun *B to B (Business to Business)*. Pertamina aktif mencari blok-blok migas mulai dari Irak, Kazakhstan hingga ke Venezuela demi memenuhi kebutuhan minyak mentah nasional.

Pertumbuhan populasi manusia yang tak dapat dibendung membuat kebutuhan energi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ketersediaan minyak bumi yang seyogyanya adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan diyakini hanya sanggup bertahan di Bumi selama 300 tahun lagi. Sangat disayangkan, hanya ada beberapa negara yang memiliki cadangan minyak pada 100 tahun mendatang. Seperti dikutip dari laporan *BP Statistical Review*, Jumat, 12 Juli 2013

---

<sup>8</sup> Benarkah Cadangan Minyak Bumi di Indonesia akan Habis dalam Kurun Waktu 10-12 Tahun Mendatang ? diakses pada <http://www.ardiansyahnegara.com/blog/2> tanggal 29 November 2014.

Kuwait, Iran, Kanada, Venezuela dan Irak adalah 5 negara yang merupakan penguasa minyak di masa depan.<sup>9</sup>

Irak merupakan negara dengan cadangan terbesar ke-4 di seluruh dunia dengan ranking produksi di urutan ke-9 dunia. Melihat kondisi produksi minyak Irak saat ini, diyakini cadangan Irak dapat memenuhi kebutuhan produksi hingga 120 tahun. Irak yang juga merupakan salah satu negara yang memiliki nilai produksi cadangan non-konvensional pada waktu yang cukup lama. Para analis memperkirakan bahwa produksi minyak Irak akan mencapai 13 juta bph pada tahun 2017. Peningkatan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi akan meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun mendatang. Irak sebagai negara terbuka baru (pasca perang) dan pemerintah Irak membuka peluang investasi di sektor migas dari investor internasional. Berdasarkan hal tersebut, sebuah kesempatan yang menarik bagi Pertamina untuk mengembangkan usaha di Irak.<sup>10</sup>

Masih berdasarkan sumber yang sama, melihat pada *proved, probable and possible reserves* Irak diyakini memiliki cadangan migas melebihi Arab Saudi. Hal ini bukanlah merupakan kejutan mengingat Irak merupakan negara yang selama ini belum tereksplorasi. Oleh karena itu, estimasi *possible and probable reserves* sangat signifikan dibandingkan dengan *proven reserves* yang dimiliki Irak.

Kerjasama Indonesia-Irak telah berlangsung lama, terutama terkait pengembangan potensi migas. Menandai kerjasama ekonomi di bidang energi dan sumber daya mineral kedua negara, Rabu, 27 Juni 2012 dilakukan

---

<sup>9</sup> Untuk lebih detail lihat pada <http://www.infoindo.web.id/2013/07/100-tahun-lagi-hanya-5-negara-yang.html>. Diakses pada tanggal 29 November 2014.

<sup>10</sup> *Potensi dan Peluang Kerjasama Investasi di Irak dan Business Scenarios Alternatives* (Jakarta: Kementerian Perekonomian RI, Bandung 10 Mei 2013).

penandatanganan *Memorandum of Understanding* Indonesia-Irak dalam *Bilateral Meeting on Energy* yang disaksikan oleh Menteri ESDM Jero Wacik dan Deputi Wakil Perdana Menteri Energi Irak Hussain Al-Shahristiani di Hotel Shangrila, Jakarta.<sup>11</sup>

Pada pertemuan tersebut pihak Indonesia memaparkan strategi dan kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Pemaparan dilakukan oleh para pejabat eselon 1 Kementerian ESDM. Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Resiko PT Pertamina Afdal Bahaudin, memaparkan kerjasama pemulihan ekonomi Irak. Selain itu, juga ikut memberikan pemaparan dari wakil PT PGN serta PT Indonesia Power.<sup>12</sup>

Pada tahun 1980-1988, Irak terlibat perang melawan negara tetangganya, yaitu Iran. Walaupun Irak tidak mengalami kegagalan, namun Perang Irak-Iran membawa pukulan yang amat berat bagi perekonomian Irak karena sejumlah infrastruktur penting Irak mengalami kehancuran. Pada waktu itu Irak mengalami kesulitan dalam memulihkan perekonomian dengan mengandalkan sektor minyak bumi akibat anjloknya harga minyak bumi. Salah satu negara Arab yang menjadi sumber dana pinjaman Irak adalah Kuwait. Awalnya Irak meminta Kuwait untuk bersedia memutihkan hutang-hutangnya, namun Kuwait menolak. Penolakan tersebut kemudian berbuntut pada semakin kerasnya sikap Saddam Hussein kepada Kuwait. Saddam menuduh bahwa Kuwait dengan sengaja memanipulasi harga minyak dunia untuk menghancurkan perekonomian Irak. Saddam juga

---

<sup>11</sup> Lebih jelasnya lihat di <http://www.migas.esdm.go.id/wap/?op=Berita&id=2791>. Diakses pada tanggal 28 November 2014.

<sup>12</sup> Untuk lebih jelas, silahkan lihat di <http://www.tambangnews.com/berita/utama/2471-mou-indonesia-irak-bidang-energi-ditandatangani.html>. Diakses pada tanggal 28 November 2014.

menuduh bahwa Kuwait menyedot cadangan minyak di wilayah Irak dengan melakukan pengeboran miring dari balik perbatasan kedua negara.<sup>13</sup>

Pada tanggal 2 Agustus 1990, pasukan Irak melakukan serangan darat dan udara besar-besaran ke Kuwait. Hanya dalam waktu 2 hari seluruh wilayah Kuwait berhasil ditaklukkan oleh pasukan Irak. Pasca jatuhnya Kuwait ke tangan Irak, Saddam lalu menjadikan Kuwait sebagai provinsi baru Irak. Sementara itu, PBB menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Irak sambil meminta Irak untuk segera menarik mundur pasukannya dari wilayah Kuwait. Perintah PBB tersebut tidak digubris oleh Irak, sehingga AS kemudian meminta negara-negara anggota PBB yang lain untuk mengirimkan tentaranya menggempur pasukan Irak di Kuwait. Terdapat 34 negara yang mengirimkan personil militernya untuk bergabung ke dalam pasukan koalisi anti-Irak, yaitu AS, Arab Saudi, Argentina, Australia, Bahrain, Bangladesh, Belanda, Belgia, Kanada, Cekoslovakia, Denmark, Mesir, Perancis, Hongaria, Inggris, Italia, Kuwait, Maroko, Selandia Baru, Niger, Norwegia, Oman, Pakistan, Polandia, Portugal, Qatar, Senegal, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Suriah, Turki, Uni Emirat Arab dan Yunani.<sup>14</sup>

Pasukan koalisi melakukan serangan udara besar-besaran ke target-target vital milik militer Irak seperti pangkalan udara, pusat komunikasi dan gudang senjata. Bulan berganti, pasukan koalisi yang awalnya berkonsentrasi melakukan serangan dari udara mengalihkan fokusnya ke *front* darat. Tanggal 24 Februari pasukan koalisi melakukan serangan darat besar-besaran dari Arab Saudi timur laut menuju Kuwait dan Irak selatan. Karena pasukan Irak sudah jatuh melemah akibat serangan udara besar-besaran sejak 1 bulan sebelumnya, pasukan koalisi

---

<sup>13</sup> <http://republik-tawon.blogspot.com/2014/01/perang-teluk-bentrokan-pertama-irak.html>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

<sup>14</sup> *Ibid.*

hanya memerlukan waktu singkat untuk menguasai Kuwait. Seiring dengan semakin dalamnya pergerakan pasukan koalisi di Kuwait, semakin banyak personel militer Irak yang menyerah atau melarikan diri ke negara asalnya. Tepat tanggal 28 Februari Perang Teluk berakhir dengan kemenangan pasukan koalisi.<sup>15</sup>

Peristiwa yang terjadi pasca perang dingin, khususnya setelah berlangsungnya Perang Teluk II yang menjadikan Irak sebagai pihak yang kalah dan menerima akibatnya sejak saat itu sampai sekarang. Invasi Amerika ke Irak pada bulan Maret tahun 2003 lalu adalah sebagai salah satu bagian dari kebijakan pemerintahan George Bush. Realitas yang muncul sebagai dampak dari perang yang berlangsung di Irak adalah terjadinya penderitaan rakyat Irak yang sangat memilukan dan berdampak sangat panjang terhadap nasib masa depan rakyat Irak. Terhadap masalah ini Amerika terbukti telah melanggar HAM di Irak, hal yang tak terelakkan sebagai akibat dari perang yang tak berperikemanusiaan.<sup>16</sup>

Serangan AS ke Irak pada tahun 2003 menimbulkan dampak yang cukup besar, yaitu adanya perubahan sosial pada masyarakat Irak, adanya perubahan politik di Irak dan adanya perubahan sistem ekonomi masyarakat Irak pasca Invasi AS.<sup>17</sup>

Hancurnya infrastruktur pun banyak dialami oleh seluruh wilayah, terutama yang terjadi akibat perang. Oleh karena hal tersebut, Irak menginginkan untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia khususnya dalam rekonstruksi Irak.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Realitas di balik konflik Amerika Serikat-Irak : analisis terhadap invasi AS ke Irak. Azman Ridha Zain. Diakses di [lontar.ui.ac.id/file?file=metadata/93120.xml](http://lontar.ui.ac.id/file?file=metadata/93120.xml) pada tanggal 11 Desember 2014.

<sup>17</sup> Invasi Amerika Serikat ke Irak Tahun 2003. Untuk lebih jelas silahkan akses di <https://fersyhana.wordpress.com/2011/12/22/invasi-amerika-serikat-ke-irak-tahun-2003/>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang besar dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Pemerintah Indonesia sangat tertarik untuk membangun hubungan yang kuat dengan negara Irak yang faktor utamanya dalam sumber minyak bumi yang melimpah dan produksi minyak yang akhir - akhir ini semakin meningkat. Indonesia dan Irak bisa membangun hubungan yang kuat, yaitu dalam rangka mendukung rekonstruksi infrastruktur serta pengembangan ekonomi Irak. Indonesia bersedia untuk mempromosikan, insentif, mendukung dan mengkoordinasikan agar perusahaan-perusahaan Indonesia bersedia berinvestasi di Irak. Sebagai timbal baliknya dalam rangka meningkatkan ketahanan energi Indonesia, Irak dapat memfasilitasi investasi perusahaan Indonesia dalam bentuk industri minyak dan gas.<sup>18</sup>

Hubungan bilateral Indonesia dan Irak telah berlangsung lama. Kedua negara memiliki beberapa kesamaan sosial budaya. Selain itu, sumber daya migas kedua negara juga menjadi salah satu penguat kerjasama bilateral Indonesia dan Irak. Kerjasama migas antara kedua negara ini semakin erat saat kunjungan *Deputy Prime Minister for Energy Republik Irak Hussain Al-Shahristani* ke Indonesia tanggal 24-27 Juni 2012. Pertemuan bilateral tersebut telah membuka peluang kerja yang lebih besar diantara kedua negara. Saat itu, kedua negara sepakat untuk menuangkan bentuk kerjasama secara konkret dalam sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) yang kemudian rencananya akan disusul dengan semacam LOI (*Letter of Intent*) antara kedua negara.<sup>19</sup>

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, telah dilakukan pula penandatanganan *Sales and Purchase Agreement (SPA)* minyak mentah Irak jenis

---

<sup>18</sup> *Business Proposal to the Government of Iraq 2013*. (Jakarta: Kementerian Perekonomian RI, 2013).

<sup>19</sup> *Ibid.*

*Basrah Light* antara PT Pertamina (Persero) dengan *State Oil Marketing Organization* (SOMO) sebanyak 33.000 bph efektif per 1 Mei 2013 sampai dengan Desember 2013. Bahkan, pihak Irak menyampaikan kesediaannya untuk mensuplai hingga 300.000 bph minyak mentah *Basrah Light*. Pembelian minyak mentah *Basrah Light* tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah Pertamina. Sehubungan dengan keikutsertaan pengusaha - pengusaha Indonesia dalam kunjungan ke Baghdad, Deputy Perdana Menteri Irak mengundang pengusaha Indonesia untuk bekerjasama dengan Pemerintah dan pengusaha-pengusaha Irak dalam membangun perumahan, jaringan telekomunikasi, pelabuhan, perbankan dan lainnya. Deputy Perdana Menteri Irak mengajak perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di Irak dan siap memberikan segala fasilitas dan kemudahan yang diperlukan perusahaan - perusahaan Indonesia. Irak menganggap bahwa kedua sektor tersebut sangat penting untuk dikembangkan di Irak.<sup>20</sup>

Masih berdasarkan sumber diatas, pihak Irak mengajak perusahaan Indonesia untuk membangun pabrik pupuk urea dan fosfat di Irak. Para pengusaha Indonesia yang terdiri dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti PT Pertamina, PLN, PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT PP (Pembangunan Perumahan) dan *Other Indonesian EPC and Construction Companies* melakukan pertemuan *one-on-one* dengan mitra pengusaha dari Irak pada tanggal 13 Maret 2013. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI M. Hatta Rajasa, menyatakan kesiapan perusahaan

---

<sup>20</sup> *Laporan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ke Baghdad, Irak.* (Jakarta: Kementerian Perekonomian RI).

Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kembali Irak (*rebuilding Iraq*) pasca perang di berbagai sektor.

Di bidang energi, Deputi Perdana Menteri Irak menyampaikan bahwa Irak memiliki sumber-sumber energi alam yang melimpah, seperti minyak dan gas bumi. Dalam kaitan ini, Irak menyambut baik penandatanganan MoU Kerjasama Energi dan Sumber Daya Mineral antara Indonesia dan Irak. Terkait keinginan PT Pertamina untuk memiliki kepemilikan saham sebesar 10%-20% dalam pengelolaan lapangan minyak West Qurna-1 di Irak yang saat ini dipegang oleh *Exxon Mobil*, Deputi Perdana Menteri Irak menyatakan dukungannya agar keinginan PT Pertamina tersebut dapat terwujud dan akan meminta *Exxon Mobil* untuk menjual 10%-20% saham kepemilikannya di West Qurna-1 kepada PT Pertamina.<sup>21</sup>

Dalam kerjasama ini, PT Pertamina dijadikan sebagai lokomotif dari beberapa BUMN Indonesia lainnya. Pertamina sebagai perusahaan nasional bertanggung jawab menyediakan kebutuhan BBM untuk penggerak roda perekonomian Indonesia. Untuk meningkatkan *competitive advantage* dalam memenangkan persaingan yang ketat di luar negeri, PT Pertamina harus memaksimalkan “*value*” sebagai perusahaan energi korporat dan mengikutsertakan kekuatan nasional (Pemerintah, institusi dan usaha lainnya) dalam Indonesia *Incorporated*.<sup>22</sup>

Dalam kerjasama Indonesia *Incorporated* di Irak, hambatan yang dihadapi umumnya terkait belum adanya *tax treaty* Indonesia-Irak. Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri berupaya untuk membuka negosiasi dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

pemerintah Irak agar bisa disepakatinya *tax treaty* ini. Dengan adanya *tax treaty* ini akan memberikan insentif bagi perusahaan Indonesia, khususnya BUMN dalam membuka usaha dan kantor di Irak.

Keadaan ini melahirkan tantangan baru bagi PT Pertamina serta BUMN lainnya, khususnya bagi pemerintahan Indonesia ke depan bagaimana energi serta cadangannya masih tetap tersedia, prioritas pengembangan energi dan pemanfaatan sumber daya energi nasional dapat dilakukan.

Melihat pada perkembangan yang begitu pesat pada potensi minyak Irak sampai sekarang ini, diiringi dengan adanya kerjasama Indonesia dan Irak dalam bidang energi, maka penulis mencoba mengkaji serta menganalisa mengenai **“STRATEGI INDONESIA DALAM PEMENUHAN MINYAK DALAM NEGERI MELALUI USAHA INDONESIA *INCORPORATED* DI IRAK”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi strategi Indonesia dalam pemenuhan minyak dalam negeri ?
2. Bagaimana efektivitas strategi Indonesia melalui *Incorporated* di Irak dalam pemenuhan minyak dalam negeri ?
3. Apakah persoalan *tax treaty* Indonesia-Irak melalui pendekatan *G to G* dapat diatasi ?

## 1. Pembatasan Masalah

Mengingat penelitian ini sangat luas dan kompleks, maka penulis membatasi fokus pembahasannya pada strategi Indonesia *Incorporated* di Irak dalam *competitive advantage* dan *competitive value* dalam pemenuhan minyak negeri.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana implementasi strategi Indonesia *Incorporated* di Irak memberikan pengaruh terhadap *competitive advantage* dan *competitive value* terutama dalam pemenuhan minyak dalam negeri ?”.**

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi strategi Indonesia dalam pemenuhan minyak dalam negeri.
- b. Untuk mengetahui efektivitas strategi Indonesia melalui *Incorporated* di Irak dalam pemenuhan minyak dalam negeri.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian *tax treaty* Indonesia-Irak melalui pendekatan *G to G*.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Program S-1 pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung serta untuk mendapatkan gelar “Sarjana Ilmu Politik (S.Ip)”.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah perbendaharaan wawasan pengetahuan studi Hubungan Internasional khususnya berkenaan dengan penelitian terkait.
- c. Penulis juga berharap dapat memberikan sumbangan dan kontribusi efektif bagi masyarakat mengenai strategi Indonesia dalam pemenuhan minyak dalam negeri melalui *Incorporated* di Irak.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Untuk mempermudah proses penelitian ini diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Sebelum mengemukakan konsep-konsep yang akan membahas pokok-pokok pikiran yang sesuai dengan tema penelitian ini adalah suatu keharusan di dalam suatu penelitian untuk menggunakan pendekatan ilmiah kerangka pikiran konseptual dalam mengarahkan penelitian yang dimaksud.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka berpikir deduktif atau pengambilan kesimpulan untuk hal-hal yang khusus berdasarkan kesimpulan yang

bersifat umum dengan kerangka konseptual agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam *scope* Hubungan Internasional.

Dewasa ini adanya masyarakat internasional yang saling mengadakan interaksi merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi dimana negara-negara di dunia adalah pelaku hubungan internasional.

Pola-pola interaksi dalam hubungan internasional yang meliputi berbagai aspek kehidupan umumnya diwarnai oleh tiga pola hubungan, yaitu kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan konflik (*conflict*) antar pelaku interaksi, baik itu *state actor* maupun *non-state actor*. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan maupun perbedaan kepentingan di antara para pelaku hubungan tersebut. Pola-pola interaksi tersebut membuktikan bahwa setiap negara saling membutuhkan satu sama lain yang juga menunjukkan adanya kompleksitas dan interaksinya dalam hubungan internasional. Adanya keinginan untuk melakukan kerjasama yang merupakan sebuah aktivitas diantara negara-negara dalam membentuk suatu hubungan baik secara bilateral maupun multilateral.<sup>23</sup>

Hal diatas mengarahkan kita untuk memahami terlebih dahulu mengenai pengertian dari hubungan internasional itu sendiri. Hubungan Internasional sendiri merupakan penjabaran dari :

**“Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, arah baru dari politik internasional, semua aspek sosial kehidupan manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain, suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri”.**<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Teuku May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.1.

<sup>24</sup> Suwardi Wiriadmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm.36.

Dapat diartikan bahwa hubungan internasional mencakup interaksi yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam segenap kehidupan manusia.

Studi hubungan internasional dikembangkan untuk memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional. Pada dasarnya studi hubungan internasional bertujuan untuk mempelajari perilaku para aktor negara maupun non-negara dalam arena transaksi internasional. Perilaku para aktor tersebut dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.<sup>25</sup>

Kecenderungan sebuah negara melakukan suatu hubungan dengan negara lain baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral dapat dilihat dan dipertegas dengan melihat definisi Hubungan Internasional menurut K.J Holsti, yaitu :

**“Hubungan internasional berkaitan erat dengan segala interaksi diantara masyarakat negara - negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan pengembangan nilai-nilai dan etika internasional”.**<sup>26</sup>

Konsep Hubungan Internasional merupakan interaksi yang didalamnya terdapat kajian politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya di antara aktor-aktor negara dan aktor non negara yang berkaitan satu dengan lainnya. Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional dan penggunaan politik luar negeri dalam pencapaian kepentingan suatu negara. Adapun pengertian Politik Luar Negeri adalah :

---

<sup>25</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES, 1990), hlm. 31.

<sup>26</sup> K.J Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Terjemahan Wawan Juanda) (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 33.

**“Kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya, ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan pada tujuan yang telah ditetapkan, khususnya untuk menghadapi kurun waktu yang sedang dihadapinya dan lazimnya disebut kepentingan nasional dan merupakan pola sikap ataupun respon terhadap lingkungan ekologisnya. Respon tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi pengalaman dan kekayaan alam serta kebudayaan yang dimanifestasikan sebagai falsafah dan diakomodasikan dalam konstitusi”.**<sup>27</sup>

Politik Luar Negeri pada hakekatnya juga merupakan alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu negara dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional dan harus sesuai dengan tujuan nasional beserta sasarannya.

Suatu negara akan berinteraksi dengan negara lain dalam mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan internasional. Sedangkan bentuk interaksi dari hubungan yang dilaksanakan telah ditetapkan oleh masing-masing negara di dalam kebijaksanaan politik luar negerinya. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, bahwa “Politik luar negeri pada hakikatnya adalah alat negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijaksanaan luar negeri merupakan aspek cita - cita suatu bangsa dan oleh karenanya politik luar negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang”.<sup>28</sup>

Kebijakan itu sendiri menurut P.A Reynolds mengandung pengertian, yaitu “Sesuatu yang diungkapkan secara berhati-hati untuk menyatakan maksud dari suatu aksi yang dilakukan suatu kebijakan, sering juga ditujukan bukan hanya untuk menyatakan aksi, akan tetapi juga untuk menyatakan prinsip atau dasar-

---

<sup>27</sup> AA Banyu Perwita, Y.M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 3-4.

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri dan Pelaksanaan Dewasa ini* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 52.

dasar yang mempengaruhi dilakukannya suatu aksi untuk mencapai tujuan tertentu”.<sup>29</sup>

Sedangkan Kebijakan Luar Negeri, sebagaimana diungkapkan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya *The Internasional Relations*, yaitu “*Foreign policy is strategy of plan course of action developed by decision makers of a state or international entities aimed at achieving specific goals defined intern of national interest*”.<sup>30</sup>

Dari penggalan teori diatas, Kebijakan Politik Luar Negeri memberikan pengaruh terhadap lingkungan eksternal dan internal. Sedangkan langkah dan metode yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional disebut kebijakan nasional, yaitu tujuan nasional yang hendak dicapai dalam suatu pemerintahan merupakan kepentingan nasional negara tersebut yang pada lingkungan eksternalnya dengan kebijakan luar negeri adalah :

**“Strategi-strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan tindakan-tindakan mereka di dalam dunia internasional. Kebijakan luar negeri memperlihatkan tujuan-tujuan yang telah atau akan dicapai oleh pemimpin – pemimpin negara dalam hubungan atau situasi tertentu serta media yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Keputusan - keputusan yang yang dibuat oleh pemerintah setiap harinya diarahkan oleh tujuan dari pelaksanaan kebijakan luar negeri”.**<sup>31</sup>

Kebijakan suatu negara baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar dibuat untuk mencapai suatu tujuan nasional. Sedangkan menurut Paul Scabury dalam bukunya *Power, Freedom and Diplomacy* yang dikutip oleh K.J Holsti dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* bahwa yang dimaksud dengan tujuan nasional adalah :

---

<sup>29</sup> P.A Reynolds, *An Introduction to International Relations* (3rd edition: Longman Group UK Limited, 1994), hlm. 38.

<sup>30</sup> J.C Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary* Western Michigan University (New York: Holt Rinehart Winston Inc, 1973), hlm. 127.

<sup>31</sup> Gorman dan Toma, *International Relations: Understanding Global Issues* (USA: Brooks Co, 1991), hlm. 18.

**“Istilah tujuan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita atau tujuan suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, bahwa pengertian ini adalah konsep umum tujuan nasional dan bersifat normatif. Pengertian lain yang bersifat deskriptif, tujuan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah”.**<sup>32</sup>

Dalam berbangsa dan bernegara atau berbicara mengenai kedaulatan sebuah negara, maka akan membutuhkan diplomasi yang mencakup sarana dan mekanisme dalam menetapkan tujuan dan kepentingan suatu negara. Jack C. Plano dan Roy Olton menerangkan diplomasi, sebagai berikut: “Praktek pelaksanaan hubungan antar negara melalui perwakilan resmi. Diplomasi dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, pembentukan kebijakan luar negeri serta pelaksanaannya.”<sup>33</sup>

Diplomasi merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan, mewujudkan nilai atau menetapkan kepentingan terhadap negara yang tindakan dan perilakunya hendak ditangkal, diubah atau diperkuat. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah disusun matang oleh suatu negara, diperlukan adanya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat. Adapun pengertian kerjasama yang dikemukakan oleh Koesnadi Kertasasmita dalam bukunya *Organisasi Internasional*, yaitu “Kerjasama internasional terjadi karena *nation understanding* dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama ini didasari oleh kepentingan-kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan tersebut tidak identik”.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Paul Scabury, *Power, Freedom and Diplomacy* dikutip oleh K.J Holsti, *Op.Cit*, hlm. 30.

<sup>33</sup> J.C Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 201.

<sup>34</sup> Koesnadi Kertasasmita, *Organisasi Internasional* (Jakarta: Rosdakarya, 1983), hlm. 14.

Kerjasama internasional dilaksanakan guna meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral guna mencapai tujuan sosialnya. Sementara itu, dalam menjalankan kerjasama antara negara yang satu dengan negara lainnya harus dilandasi dengan interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain seperti halnya pada kerjasama Indonesia dengan Irak.

Seperti yang digambarkan oleh Didi Krisna dalam *Kamus Politik Internasional* mengatakan, bahwa “hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antar dua belah pihak”.<sup>35</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, Mochtar Mas’oed memberi definisi mengenai ekonomi politik internasional, yaitu “Ekonomi politik internasional sebagai studi saling keterkaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dengan lingkungan internasional dan antara pemerintah dengan masyarakat”.<sup>36</sup>

Dalam segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar negara, bangsa maupun antara orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara yang lain. Adapun tujuan dari ekonomi internasional seperti yang dikemukakan oleh Domonic Salvatore dalam bukunya *Ekonomi Internasional*, yaitu “Untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional adalah kerjasama bantu-membantu antar bangsa dan negara. Dengan adanya kerjasama ini, maka kebutuhann yang tidak terpenuhi oleh persediaan di

---

<sup>35</sup> Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional* (Jakarta: Grasindo, 1993), hlm. 18.

<sup>36</sup> Mochtar Mas’oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 2.

dalam negeri dapat dipenuhi melalui bantuan atau kerjasama dengan negara lain”.<sup>37</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan internasional terjadi karena adanya aksi dari suatu negara terhadap negara lain dalam bentuk tekanan, cara berfikir dan bertindak dalam menentukan kekuatan rakyat. Artinya, hubungan internasional terjadi tidak hanya dilakukan oleh *state* melainkan bisa terjadi antar masyarakat dunia. Hubungan internasional menghendaki adanya suatu kerjasama internasional yang nantinya dapat ditentukan pada pola yang saling menguntungkan.

Indonesia *Incorporated* adalah salah satu bentuk sinergi yang diperhitungkan kalangan usaha dan BUMN untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor. Dapat dikatakan juga sebagai konsep sinergi antar sektor dari segenap elemen bangsa dan negara dalam pembangunan nasional. Semangat Indonesia *Incorporated* diawali dengan upaya membawa bendera BUMN Indonesia di kancah dunia. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan komponen lain termasuk lembaga swadaya masyarakat merupakan kekuatan dan potensi bangsa yang sudah seharusnya wajib dan perlu dikembangkan untuk kemajuan bangsa. Pemerintah Indonesia menjadikan PT Pertamina sebagai lokomotif Indonesia *Incorporated* untuk percepatan proses rekonstruksi Irak yang kemudian bisa dijadikan bukti dalam pengembangan usaha-usaha BUMN Indonesia di kalangan mancanegara, yang mendorong kemajuan ekonomi bangsa serta mendukung ketahanan energi nasional.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Dominic Salvatore, *Internasional Economic* (Cambridge: Cambridge University, 1984), hlm.1.

<sup>38</sup> Sinergi Untuk Program Indonesia *Incorporated*. Lebih jelasnya silahkan lihat di <http://www.pertamina.com/media/8d877376-e3b5-46fe-9ef0->

Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan akuisisi. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Seperti yang dikatakan oleh Brealey, Myers & Marcus mendefinisikan “akuisisi adalah pengambil-alihan (*take over*) sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibeli tetap ada (1999, hlm. 598).

Dalam kondisi ekonomi sekarang ini tidaklah mudah bagi perusahaan untuk dapat bertahan dan berkembang. Michael E. Porter (1994;1) mengemukakan pengertian dari *Competitive Advantage*, yaitu “pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri, arena fundamental tempat persaingan terjadi”. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus melakukan satu atau lebih nilai menciptakan kegiatan dengan cara yang menciptakan nilai lebih secara keseluruhan daripada pesaing.<sup>39</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, PT Pertamina sebagai lokomotif dalam Indonesia *Incorporated* menetapkan enam nilai yang dapat menjadi pedoman dalam menjalankan perusahaan, yaitu *clean, competitive, confident, customer focused, commercial* dan *capable*.<sup>40</sup>

Adapun pengertian strategi yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* yang menyatakan, bahwa

---

6d01ec4d6077/Energia%20Pertamina%20November%202013%20%28Website%29.pdf. Diakses pada tanggal 14 Desember 2014.

<sup>39</sup> <http://evaratnayunita.blogspot.com/2010/12/keunggulan-kompetitif.html>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2015.

<sup>40</sup> <https://www.academia.edu/8753109/PERTAMINA>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2014.

“strategi adalah integrasi, kombinasi dan koordinasi dari alat-alat teknik yang bersama diperlukan oleh seorang negarawan guna mencapai suatu tujuan untuk menyelamatkan suatu negara dari serangan luar maupun dalam. Kalaupun harus mengambil sasaran, diperlukan pula strategi agar sasaran itu dapat dicapai” (1981:35).

Dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara tentu negara tersebut pasti membutuhkan bantuan dari negara lain, yakni dengan melakukan sebuah kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Irak mengantarkan kita dalam upaya membentuk strategi dalam pemenuhan kebutuhan minyak dalam negeri melalui *Incorporated* di Irak.

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, penulis membuat beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Strategi Indonesia dalam pemenuhan minyak dalam negeri, yakni dengan dibentuknya Indonesia *Incorporated* di Irak. Sebagai timbal baliknya, Indonesia mendukung rekonstruksi infrastruktur dan pengembangan ekonomi Irak.
2. PT Pertamina sebagai lokomotif *Incorporated* di Irak dalam pemenuhan minyak dalam negeri, yaitu melalui cara anorganik dimana strategi Indonesia dalam pemenuhan minyak dalam negeri berjalan efektif dengan melakukan pendekatan *G to G* yang ditandai dengan hasil akuisisi Pertamina di lapangan West Qurna-1 di Irak.
3. Dengan adanya *tax treaty* Indonesia-Irak, terdapat insentif bagi perusahaan Indonesia, khususnya BUMN dalam membuka usaha dan kantor di Irak.

## 2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**“Apabila implementasi strategi Indonesia dengan meningkatkan *competitive advantage* dan *value* melalui *Incorporated* di Irak, maka pemenuhan minyak dalam negeri dapat terpenuhi”.**

### E. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat suatu definisi operasional variabel tentang konsep hipotesis diatas, yaitu :

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel dan Indikator

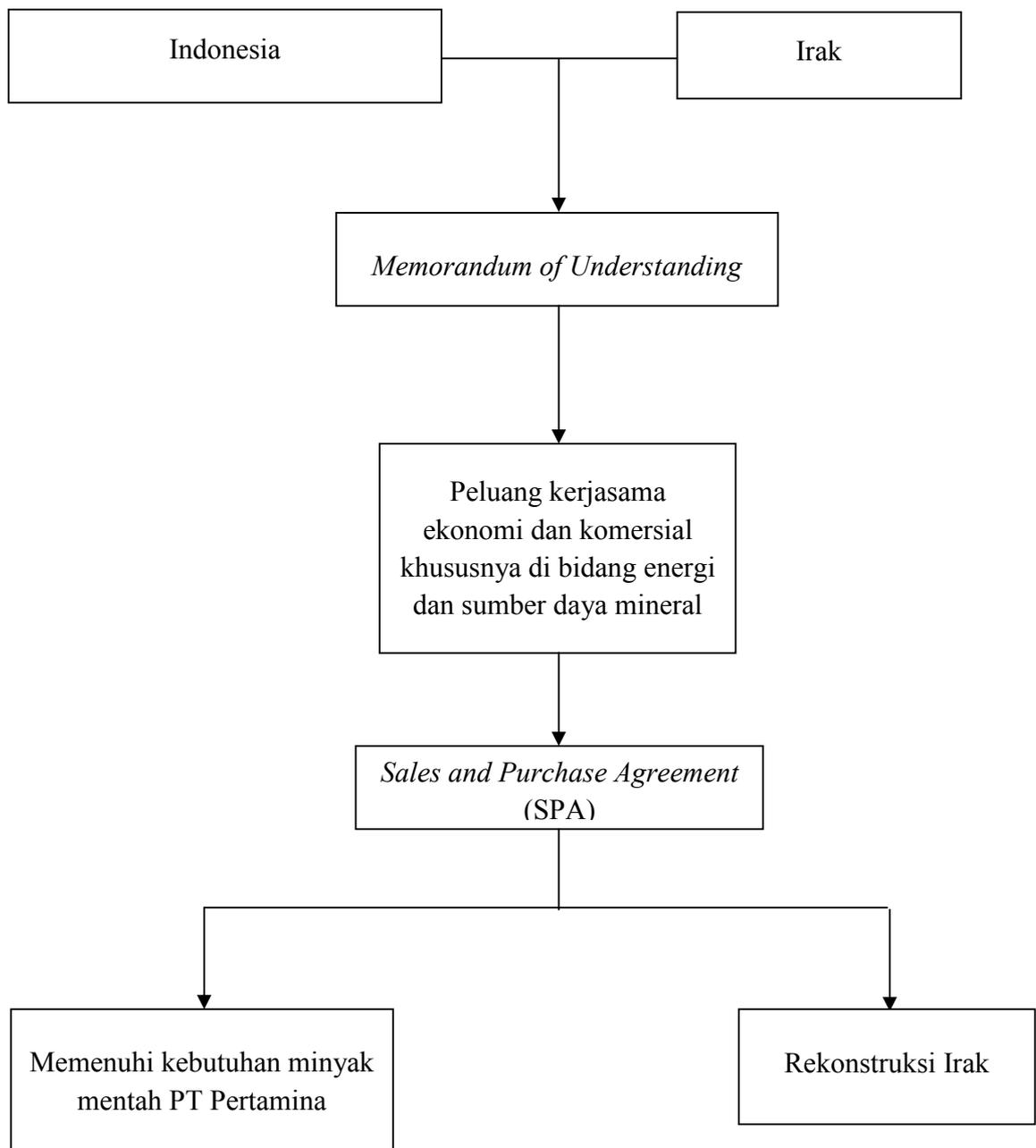
Variabel (Konsep Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi
<p><b>Variabel bebas :</b>  <b>Implementasi strategi Indonesia dengan meningkatkan <i>competitive advantage</i> dan <i>value</i> melalui <i>Incorporated</i> di Irak</b></p>	<p>1. Indonesia  <i>Incorporated</i> di Irak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MoU kerjasama di sektor energi antara Indonesia-Irak pada tanggal 14 Maret 2013. (MoU terlampir)</li> <li>• Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut telah dilakukan pula penandatanganan <i>Sales and Purchase Agreement</i> (SPA) minyak mentah Irak jenis <i>Basrah Light</i> antara PT Pertamina dengan <i>State Oil Marketing Organization</i> (SOMO) sebanyak 33.000 barel per hari yang efektif per 1 Mei 2013 sampai dengan Desember 2013. Sumber : <i>Business Proposal to the Government of Iraq 2013</i>.</li> <li>• Pemerintah Irak menyampaikan kesediaannya untuk mensuplai hingga 300.000 barel per hari minyak mentah <i>Basrah Light</i>. Pembelian minyak mentah <i>Basrah Light</i> tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah PT Pertamina. Sumber : Laporan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ke Baghdad, Irak, Maret 2013.</li> </ul>

	2. Dukungan pemerintah Irak terkait rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deputi Perdana Menteri Irak mengundang pengusaha Indonesia untuk bekerjasama dengan Pemerintah dan pengusaha-pengusaha Irak dalam membangun perumahan, jaringan telekomunikasi, pelabuhan, perbankan dan lainnya. Selain itu, juga mengajak perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di Irak dan siap memberikan segala fasilitas dan kemudahan yang diperlukan perusahaan-perusahaan Indonesia.</li> <li>• Selain itu juga mengusulkan agar dibentuk <i>Task Force</i> di bidang energi, konstruksi, telekomunikasi dan pariwisata sebagai bentuk <i>quick wins</i> yang diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi perkembangan ekonomi kedua negara di masa yang akan datang. Sumber : Laporan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ke Baghdad, Irak, Maret 2013.</li> </ul>
<b>Variabel Terikat : Pemenuhan minyak dalam negeri dapat terpenuhi</b>	1. Kerjasama dalam pemenuhan minyak dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak Irak telah mensuplai minyak sebanyak 33.000 barel per hari yang efektif per 1 Mei 2013 sampai dengan Desember 2013. Sumber : <i>Business Proposal to the Government of Iraq 2013</i>.</li> <li>• Adanya keinginan Pertamina untuk mengaktifkan kembali Blok 3 Western Desert di Irak sebagai salah satu langkah strategis dalam pemenuhan energi nasional. Sumber : Majalah Media-Pertamina Jadi Lokomotif Indonesia <i>Incorporated</i> di Irak, Juli 2012.</li> </ul>
	2. Rekonstruksi Irak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam rekonstruksi Irak memfasilitasi melalui investasi Perusahaan Indonesia dalam industri minyak dan gas. Sumber : Laporan Kunjungan Kerja</li> </ul>

		<p>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ke Baghdad, Irak, Maret 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berdasarkan perjanjian pada MoU dan SPA diantara kedua negara disepakati bahwa kerjasama kedua negara tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga pada sektor-sektor lainnya, termasuk telekomunikasi, pertanian, infrastruktur dan industri pupuk. Sumber : Laporan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ke Baghdad, Irak, Maret 2013.</li><li>• Dalam kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ke Baghdad, Irak juga menyatakan kesiapan perusahaan Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kembali Irak (<i>rebuilding Iraq</i>) pasca perang di berbagai sektor. Sumber : Laporan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI ke Baghdad, Irak, Maret 2013.</li></ul>
--	--	---

## F. Skema Kerangka Teoritis

### Alur Pemikiran Strategi Indonesia dalam Pemenuhan Minyak Dalam Negeri Melalui Usaha Indonesia *Incorporated* di Irak



Gambar 1.1 Skema Kerangka Teoritis

## **G. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Tingkat Analisis**

Untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan menafsirkan perilaku dalam hubungan internasional secara meyakinkan, maka harus melakukan analisa. Dalam studi hubungan internasional perlu mengidentifikasi tingkat eksplanasi untuk memperjelas proses pembentukan teori. Adapun tingkat analisa yang penulis gunakan, yaitu analisa korelasional dimana unit eksplanasi dan unit analisisnya pada tingkatan yang sama.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana strategi Indonesia dalam *Incorporated* di Irak dalam pemenuhan minyak dalam negeri berdasarkan hasil pengamatan terhadap fakta dan fenomena juga masalah aktual yang ada setelah melalui proses penyusunan dan pengklarifikasian, sehingga dapat dipahami.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik mengumpulkan data berdasarkan penelaahan/penelusuran literatur. Pada penelitian ini penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip-arsip, artikel dan

*online search* di internet. Teknik lainnya, yaitu wawancara untuk memperdalam masalah yang diteliti dengan melakukan perbincangan dengan pakar terkait dengan penelitian.

## **H. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa perpustakaan dan instansi yang dianggap relevan dengan tujuan dalam memperoleh data dan informasi yang akurat dengan bahasan yang dikaji, yaitu :

- a. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pasundan Bandung  
Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung
- b. Kementerian Perekonomian Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Benteng Timur 2-4 Jakarta
- c. PT Pertamina (Persero)  
Jl. Medan Merdeka Timur 1A Jakarta 10110
- d. Perpustakaan Ali Alatas, Kementerian Luar Negeri RI  
Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan atau satu semester terhitung pada bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 dimulai dari persiapan judul proposal penelitian dan pengolahan data. Untuk lebih lengkap mengenai tahapan dari penelitian yang dilakukan tertera pada tabel berikut :